

ABSTRAK

Notaris sebagai warga negara dan wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya, Notaris wajib membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) atas honorarium dari jabatan Notaris maupun sumber penghasilan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya pelanggaran atas kewajiban ini masih terjadi, salah satunya terdapat pada kasus dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr dimana terdapat seorang Notaris yang tidak membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kurun waktu tertentu sehingga menimbulkan kerugian pada negara dan dijatuhi pidana penjara serta denda. Penelitian ini didorong oleh perlunya peninjauan konsekuensi hukum pelanggaran tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan guna memastikan penerapan hukum yang sesuai, dan menjamin keadilan substantif dalam sistem pelanggaran perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Simpulan penelitian mengarah pada penjatuhan pidana pada Notaris yang melanggar kewajiban PPh dilakukan sebagai *ultimum remedium* sesuai peraturan perundang-undangan. Putusan PN Singaraja tersebut telah memenuhi aspek keadilan baik secara prosedur maupun substansi.

Kata Kunci: Notaris; Konsekuensi Hukum; Pajak Penghasilan (PPh); Pelanggaran Perpajakan.

ABSTRACT

As citizens and taxpayers, notaries have tax obligations under existing laws. Notaries are required to pay and report Income Tax (PPh) on fees earned from their duties as well as other sources of income. However, violations of these obligations still occur. One such case is found in Judgment No. 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr, where a notary failed to pay Income Tax and did not file a Tax Return (SPT) within a specified timeframe, causing a loss to the state and resulting in a prison sentence and a fine. This study is motivated by the need to examine the legal consequences in light of applicable laws to ensure proper legal enforcement and guarantee substantive justice within the tax violation system. This study used doctrinal methods with statutory, conceptual, and case approaches. Data analysis was descriptive, drawing on secondary data via literature review and descriptive-analytical techniques. The study's conclusion suggests that the imposition of criminal penalties on notaries who violate their income tax obligations should be applied as a last resort in accordance with statutory regulations. The Singaraja District Court's ruling has upheld justice in terms of both procedure and substance.

Keywords: *Notary; Legal Consequences; Income Tax; Tax Violations.*